

**PENGELOLAAN KREDIT BAKUL PADA KOPERASI PERMATA I
DELIMA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan
Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri SUSKA Riau.



Disusun Oleh:

YULI PUSPITA SARI

NIM : 10725000240

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Peneliti tertarik meneliti masalah ini karena terdapat para pedagang atau anggota koperasi yang meminjam mengalami penunggakan pembayaran kredit bakul padahal pada koperasi tersebut melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang yang meminjam kredit bakul tersebut.

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru, lalu bagaimana pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru. Adapun alasan mengapa tempat ini dijadikan lokasi penelitian karena melihat selama ini realisasi pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima tidak sesuai dengan target semula. Subjek penelitian ini adalah anggota Koperasi Permata I Delima sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket, dan studi dokumen. Dalam teknik penulisan penelitian ini digunakan metode deskriptif terhadap data primer dan sekunder. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Permata I Delima Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.

Setelah penelitian ini dilakukan dan dianalisa, bahwa dapat diketahui proses dan prosedur penyaluran kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru mudah dan cepat, selain itu dana yang diberikan dapat membantu anggota atau pedagang dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih meningkat. Proses pengelolaan dalam suatu koperasi atau lembaga memerlukan pengelola atau pengurus, tetapi pengurus tidak melakukan pembinaan terhadap pedagang atau anggota yang meminjam kredit bakul sehingga akan terjadi penunggakan pembayaran dan akan menghambat perkembangan koperasi tersebut. Namun dalam pengembalian kredit tersebut koperasi ini menggunakan tingkat suku bunga, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Ekonomi Islam karena bunga dalam ekonomi Islam dikategorikan riba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
HALAMAN MOTTO	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan & Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI PERMATA I DELIMA PEKANBARU	
A. Sejarah Singkat Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	18
B. Visi dan Misi Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	19
C. Struktur Organisasi Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	20
D. Program Kerja	23
BAB III TELAAH PUSTAKA	
A. Koperasi	
1. Pengertian Koperasi	25
2. Dasar Hukum Koperasi (Syirkah)	27
3. Prinsip Koperasi	28
4. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi	30
5. Jenis-Jenis Koperasi	31
6. Fungsi dan Peran Koperasi	34

B. Kredit

1. Pengertian Kredit dan Masalahnya	35
2. Unsur-Unsur Kredit	40
3. Prinsip Pemberian Kredit.....	42

C. Kafalah (Penjamin)

1. Pengertian Kafalah.....	44
2. Dasar Hukum Al-Kafalah	45
3. Rukun Al-Kafalah.....	46
4. Syarat Al-Kafalah	46
5. Macam-Macam Kafalah	48
6. Pelaksanaan Kafalah	50
7. Pembayaran Dhamin.....	51

BAB IV PENGELOLAAN KREDIT BAKUL PADA KOPERASI

PERMATA I DELIMA PEKANBARU DITINJAU DARI

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Prosedur Pemberian Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.....	52
B. Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	56
C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perdebatan tentang masalah konsep ekonomi kerakyatan terus berlangsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai dasar pijakan pembangunan kedepan akan mengakibatkan pertumbuhan akan menjadi lamban. Namun hal ini langsung dibantah oleh sebagian pengamat yang justru menilai, demi kesejahteraan bangsa Indonesia kedepan yang lebih tepat adalah membangun kembali perekonomian rakyat. Dengan demikian, kita semestinya menempatkan sektor ekonomi rakyat sebagai soko guru ekonomi nasional.¹

Manusia sebagai *homo economicus*, mempunyai beberapa kebutuhan yang mesti dipenuhi. Kebutuhan manusia berdasarkan jenisnya dibedakan atas tiga yaitu primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi karena menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Seperti makan dan minum. Sedangkan kebutuhan sekunder mencakup kebutuhan yang lebih dari sekedar melanjutkan hidup. Seperti: pakaian dan perumahan. Dua hal ini yang paling vital bagi manusia. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier yang mencakup kelengkapan kehidupan manusia dimana ketika kedua kebutuhan sebelumnya dipenuhi, maka kebutuhan tersier menjadi target berikutnya.

¹ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), Cet Ke-1, h 107

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengenal kata kredit, mulai dari kredit barang pecah belah yang diajakan oleh tukang kredit dari rumah ke rumah atau kredit bentuk uang yang diberikan oleh tukang-tukang ijon. Dalam skala yang lebih luas lagi kita mengenal kredit yang diberikan oleh perusahaan *leasing* atau perbankan. Kemudian kita juga sudah mengenal setiap transaksi kredit selalu berkaitan angsuran yang harus dibayar. Para pengambil kredit juga sudah paham bahwa dalam cicilan kredit sudah mengandung pokok pinjaman dan bunga yang harus dibayar.

Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah sebutan debitur dan pihak memberi kredit (kreditur) atau dengan kata lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana.²

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka dikenakan bunga tagihan.³

Risiko yang ada pada setiap pemberian kredit dinilai tinggi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pemberian kredit ke nasabah, manajemen bank harus

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-5, h 71

³ Ibid

selalu menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principal*). Prinsip ini ditegaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

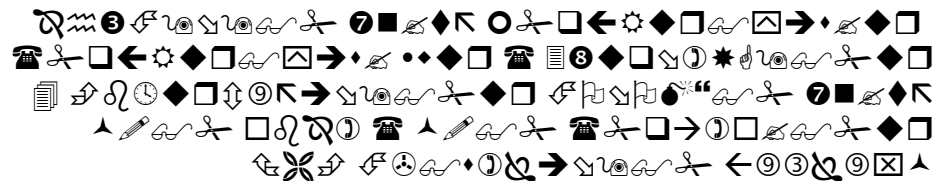
Prinsip kehati-hatian pada Bab II pasal 2 UU No. 10/1998: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi Indonesia dengan menggunakan prinsip kehati-hatian ini.

Kita telah ketahui bahwa perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi atau penghubung antara nasabah yang memiliki dana dan nasabah yang kekurangan dana. Fungsi intermediasi inilah yang dikenal dengan penyaluran kredit, yang dalam implementasinya diutamakan ke pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional yaitu koperasi, pengusaha kecil dan menengah, namun tetap memerhatikan berbagai lapisan masyarakat lain tanpa diskriminasi. Pada lingkup mikro, penyaluran kredit yang tepat akan dapat memperkuat struktur perekonomian nasional.⁴

Di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, mengungkapkan bahwa: “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dalam pasal ini tercantumnya dasar Demokrasi Ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan bukan kemakmuran perseorangan (individu). Sebab, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

⁴ Ade arthesa & edia handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks, 2006), h. 164

Di dalam ajaran Islam juga dijelaskan dan diwajibkan membantu saudara-saudara kita yang lemah atau yang sedang berada dalam kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakannya) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”. (Al-Maidah:2)⁵

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (haqa tuqatih).

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

Dalam perjalanan koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Justru pengembangannya tidak menggembirakan, koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul menghidupkan dan memberdayakan koperasi di tengah-

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007), Cet ke-2, h 85

tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis ditengah masyarakat.⁶

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.⁷

Oleh sebab itu, dalam ketentuan hukum Islam juga membolehkan untuk berkoperasi, karena koperasi termasuk ke dalam *syirkah ta'awuniyah* akan tetapi yang lebih sempurna dalam perekonomian lebih dekat kepada *syirkah inan*.⁸

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad mudharabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lain melakukan usaha atas membagi keuntungan menurut perjanjian.⁹

Koperasi mempunyai tujuan yang utama ialah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Badan koperasi mempunyai tujuan kerjasama guna mengurus kepentingan anggota-anggotanya yang bersifat kebendaan. Kepentingan yang bersifat kebendaan itu dapat merupakan pembelian barang bersama-sama agar harganya lebih rendah, penjualan bersama-

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), h. 285

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), h 289.

⁸ Abi Daud Sulaiman, *Kitab Hadist Sunan Abu Daud*, (Bandung: PT Al-Ma'arif,1998), Cet Ke-11, h 120

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung,1993), Cet Ke-V, h 114

sama untuk mempertahankan harga, menyingkirkan persaingan dan untuk memberikan pertolongan kepada anggotanya dengan memberikan pinjaman uang dan lain sebagainya.¹⁰

Kesejahteraan adalah keadaan anggota (keluarga) dimana sebagian besar kebutuhan pokok dapat dipenuhi. Kesejahteraan pada hakekatnya diukur antara jumlah penghasilan yang diperoleh dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

Berkaitan dengan pendapat di atas bahwa anggota yang dapat dikatakan sejahtera apabila jumlah penghasilan mereka dapat memenuhi kebutuhannya, baik fisik maupun spiritual. Kebutuhan fisik yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian, perumahan dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual adalah kebutuhan akan pendidikan, hiburan, kebebasan memeluk agama (kepercayaan) diantara mereka.¹¹

Upaya melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan staff dan pengendalian merupakan langkah-langkah yang secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan manusia. Perencanaan merupakan langkah yang dirumuskan oleh manusia. Pengorganisasian itu sendiri adalah untuk mengatur manusia. Penggerakan staff adalah langkah untuk menjadikan mereka mau melaksanakan apa saja yang telah digariskan dan pengendalian dilakukan dengan tujuan agar pelaksana manajemen selalu dapat mengetahui bagaimana hasil karyanya serta dapat meningkatkannya¹². Dengan demikian jelaslah bahwa

¹⁰ Fuad Mohd Fach Ruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, (Bandung: PT Alma'arif, 1985), cet ke-IV, h.167.

¹¹ G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: bina Adi Aksara, 2003), Cet ke-5, h.45.

¹² Pandji Anoraga, *Koperasi kewirausahaan dan usaha kecil*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 2002), Cet ke-1, h.92.

berhasil atau tidaknya suatu organisasi termasuk juga di dalamnya koperasi sangat ditentukan oleh bagaimana perilaku manusia yang menjadi salah satu sub sistem di dalamnya.

James A. F Stoner mendefinisikan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan untuk mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya modal yang dimiliki oleh organisasi disebut pengorganisasian (*organizing*), dan dilakukan oleh seorang manajer. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Secara umum, struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat diurut berdasarkan perangkat organisasi koperasi yaitu:¹³

- a. Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum yang bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- b. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan rapat anggota.
- c. Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus.
- d. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha.

¹³ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga,2001), h. 33-40

Dalam rangka menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia ini menggalakkan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan yang disebut juga dengan koperasi. Salah satu usaha pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut adalah Koperasi Permata I Delima yang berada di Pekanbaru.

Koperasi Permata I Delima sebagai koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam (kredit) akan dapat membantu para pedagang untuk meringankan beban hidup dan kesulitan masyarakat. Koperasi Permata I Delima telah berdiri sejak tahun 2003 dan telah berbadan hukum pada tahun 2004 dan sampai saat ini anggota koperasi tersebut baru menampung sebanyak 139 orang baik yang aktif maupun yang tidak aktif. Koperasi ini telah bekerja sama dengan PT PER (Perekonomian Rakyat).

Namun dalam kenyataannya, banyak para pedagang mengeluh dengan sistem peminjaman yang ada di Koperasi Permata I Delima tersebut, hal ini dikarenakan adanya sistem pemotongan modal yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap modal yang dipinjamkan untuk keperluan jasa, administrasi dan kesejahteraan anggota.¹⁴

Pada Koperasi Permata I Delima setiap penunggakan akan dikenakan sanksi baik itu berupa denda, skorsing, teguran dan lain sebagainya sesuai dengan tingkat penunggakan yang terjadi. Hal ini dibuat agar supaya tidak terjadi kredit macet yang dapat menghambat perkembangan koperasi ini dan tidak semena-

¹⁴ Sardawati, (Ketua Koperasi Permata I Delima), *wawancara*, di Pekanbaru, Rabu, 12 Januari 2011

mena menggunakan uang pinjaman untuk keperluan lain, agar Koperasi Permata I Delima yang di kelola terus berkembang dari tahun ke tahun.

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, koperasi ini dapat memberikan pinjaman kredit yang disebut dengan Kredit Bakul. Kredit Bakul adalah Kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil tanpa agunan untuk pembiayaan investasi atau modal kerja. Dengan adanya kredit bakul ini anggota koperasi dapat memberikan pinjaman kredit kepada para pedagang.

Koperasi Permata I Delima membagi 5 kelompok yang bertujuan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada para anggota atau pedagang yang melakukan pinjaman kredit bakul. Pedagang yang meminjam kredit bakul ini meliputi perdagangan buah-buahan, usaha ponsel, perdagangan bahan jadi, perdagangan sayur mayur, perdagangan sembako, perdagangan makanan jadi dan perdagangan kelontong.¹⁵

Pada Koperasi Permata I Delima yang mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman kredit bakul sebanyak 40 orang. Hal ini di karenakan kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku dan lainnya. Apabila terdapat anggota yang mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman atau kabur maka yang bertanggung jawab adalah semua anggota kelompok. Jadi anggota kelompok merupakan pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kewajiban pihak kedua yang diberikan oleh penaggung (kafalah).

¹⁵ Afnizar, (Bendahara Koperasi Permata I Delima), *wawancara*, di Pekanbaru, Jum'at, 11 Maret 2011

Hal ini terbukti masih terdapat anggota yang meminjam terlambat bahkan tidak dapat membayar tunggakan kepada koperasi pada saat jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Dan masih ada anggota yang mendapat teguran dari pengurus koperasi padahal dalam koperasi ini dilakukan pengawasan dan bimbingan yang dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri.¹⁶

Di samping memberikan pinjaman kredit sebagai modal tambahan bagi anggota, pengurus juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota yang diberikan pinjaman agar dana yang telah dipinjamkan betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Sebelum peminjam memperoleh pinjaman terlebih dahulu harus melalui tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dicairkan. Tahap-tahap dalam pemberian kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak.

Pinjaman yang diajukan oleh Ny Siti sebesar Rp 3.000.000,- namun dana yang diterima secara utuh adalah sebesar Rp 2.850.000,- selebihnya dipotong oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru sebagai biaya administrasi dan kesejahteraan anggotanya.

Pada kasus di atas, dapat dilihat bagaimana sesungguhnya cara pengelolaan pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru. Kaedah hukum Islam dinyatakan dengan jelas bahwa “ setiap pinjaman yang memungut tambahan

¹⁶ Hj. Nursiam (Anggota Koperasi Permata I Delima), *wawancara*, di Pekanbaru, Selasa, 1 Maret 2011.

adalah riba”. Dan pemotongan pinjaman sebesar Rp 150.000,- adalah zalim, karena mengambil hak secara paksa dari seharusnya yang berhak menerimanya. Sebagaimana halnya setiap pedagang harus menyempurnakan takaran jual beli, lagi pula potongan dirasakan sangat memberatkan bagi sipeminjam. Dan sudah jelas hal demikian dilarang di dalam muamalah. Terhadap denda yang dikenakan tidak dapat di toleransi sebagai sesama manusia.

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak koperasi dapat meminta kepada nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan dalam pemikiran penulis, mengapa hal yang demikian bisa terjadi? Padahal setiap anggota yang meminjam selalu diberikan bimbingan dan tuntutan serta diawasi oleh badan pengawas koperasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang membahas tentang **“Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.”**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ekonomi kerakyatan pada koperasi?
2. Apa saja resiko yang terdapat pada pemberian kredit koperasi pada koperasi?

3. Apakah pelaksanaan pengelolaan kredit bakul di koperasi telah sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan secara teoritis sehingga dapat diperoleh hasil seperti yang diharapkan?

C. Batasan Masalah.

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti adalah Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
2. Bagaimana pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima.
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima.

2. Manfaat penelitian.

- a. Menambah wawasan bagi penulis dalam mengetahui dan menerapkan ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama untuk masa yang akan datang.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam UIN Suska Riau.

F. Metode Penulisan.

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁷

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Koperasi Permata I Delima yang berlokasi di jalan Delima Gg. Delima XI Pekanbaru.

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Koperasi Permata I Delima karena melihat selama ini realisasi pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima tidak sesuai dengan target semula.

2. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian ini adalah anggota dan non anggota Koperasi Permata I Delima sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima.

3. Populasi dan Sampel.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota atau non anggota Koperasi Permata I Delima. Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 139 orang. Karena jumlah populasi penelitian cukup besar, penulis mengambil sampel sebanyak 42 orang atau 30 % dari total populasi yang terdiri dari 26 orang anggota koperasi dan 16 orang non anggota koperasi atau pedagang yang meminjam kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.

4. Sumber Data.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Koperasi Permata I Delima.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (library research) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data lapangan yang valid dan akurat dari subjek penelitian, penulis menggunakan instrumen:

a. Observasi.

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.

b. Wawancara.

Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian.

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka (open interview), adapun yang menjadi informan adalah seluruh anggota Koperasi Permata I Delima.

c. Angket.

Penulis membuat pertanyaan berupa angket yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan akan dijadikan data primer.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan social dan dokumen lainnya.

6. Metode Penulisan.

Setelah data yang terkumpul di analisis, maka penulis membahas data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan, lalu di analisis sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

7. Analisis Data.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian di uraikan

antara satu data dengan data lainnya dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : Pendahuluan.

Yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Objek Penelitian.

Yang terdiri dari: Sejarah Singkat Koperasi Permata I Delima, Visi Dan Misi Koperasi Permata I Delima, Struktur Organisasi Koperasi Permata I Delima, Program Kerja.

BAB III : Telaah Pustaka.

Yang terdiri dari: Pengertian Koperasi, Prinsip Koperasi, Dasar Hukum Koperasi, Prinsip Koperasi, Syarat-Syarat Pendirian Koperasi, Jenis-Jenis Koperasi, Fungsi Dan Peran Koperasi, Pengertian Kredit dan masalahnya, Unsur-unsur Kredit, Prinsip Pemberian Kredit, Pengertian Al-Kafalah (Jaminan), Dasar Hukum Al-Kafalah, Rukun

Al-Kafalah, Syarat Al-Kafalah, Macam-Macam Kafalah, Pelaksanaan Kafalah, Pembayaran Dhamin.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Yang terdiri dari: Prosedur Pemberian Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima, Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima.

BAB V : Kesimpulan Dan Saran.

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI PERMATA I DELIMA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Koperasi Permata I Delima

Dilihat dari perkembangan masyarakat terutama dalam dunia usaha, banyak anggota masyarakat untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman-pinjaman illegal (rentenir). Walaupun ada juga sebagian masyarakat meminjam dananya pada bank-bank konvensional.

Koperasi Permata I Delima telah berdiri pada tahun 2003. Baru pada pertengahan bulan april 2004, tepatnya pada tanggal 16 April 2004 Koperasi Permata I Delima beroperasi dengan badan hukum nomor 397/BH/DISKOP & UKM/3/IV/2004, berbekal izin operasional dari Menteri Negara Urusan Koperasi & Usaha Kecil & Menengah Republik Indonesia.¹

Koperasi Permata I Delima merupakan salah satu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan bukan hanya bersifat sosial akan tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Oleh sebab itu dana yang dikumpulkan dari anggota dan masyarakat di salurkan kembali dalam bentuk pinjaman (pembiayaan) kepada anggota atau masyarakat.

¹ Dokumentasi Koperasi Permata I Delima Pekanbaru, Rapat Anggota Tahunan, (Tahun Buku, 2004), h. 2.

Koperasi Permata I Delima memulai kiprahnya dengan modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan dari para pendiri.

Diawal operasionalnya Koperasi Permata I Delima dengan keyakinan yang tinggi menyalurkan produk, yang penyalurannya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan selektif kepada anggota dan masyarakat umum. Alhamdulillah, program ini dinilai cukup berhasil dan koperasi Permata I Delima telah bekerja sama Dengan PT Perekonomian Rakyat (PT PER).²

B. Visi dan Misi Koperasi Permata I Delima

Visi Koperasi Permata I Delima

“Terwujudnya Koperasi Simpan Pinjam yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama dan berkeadilan di Indonesia”.

Misi koperasi Permata I Delima

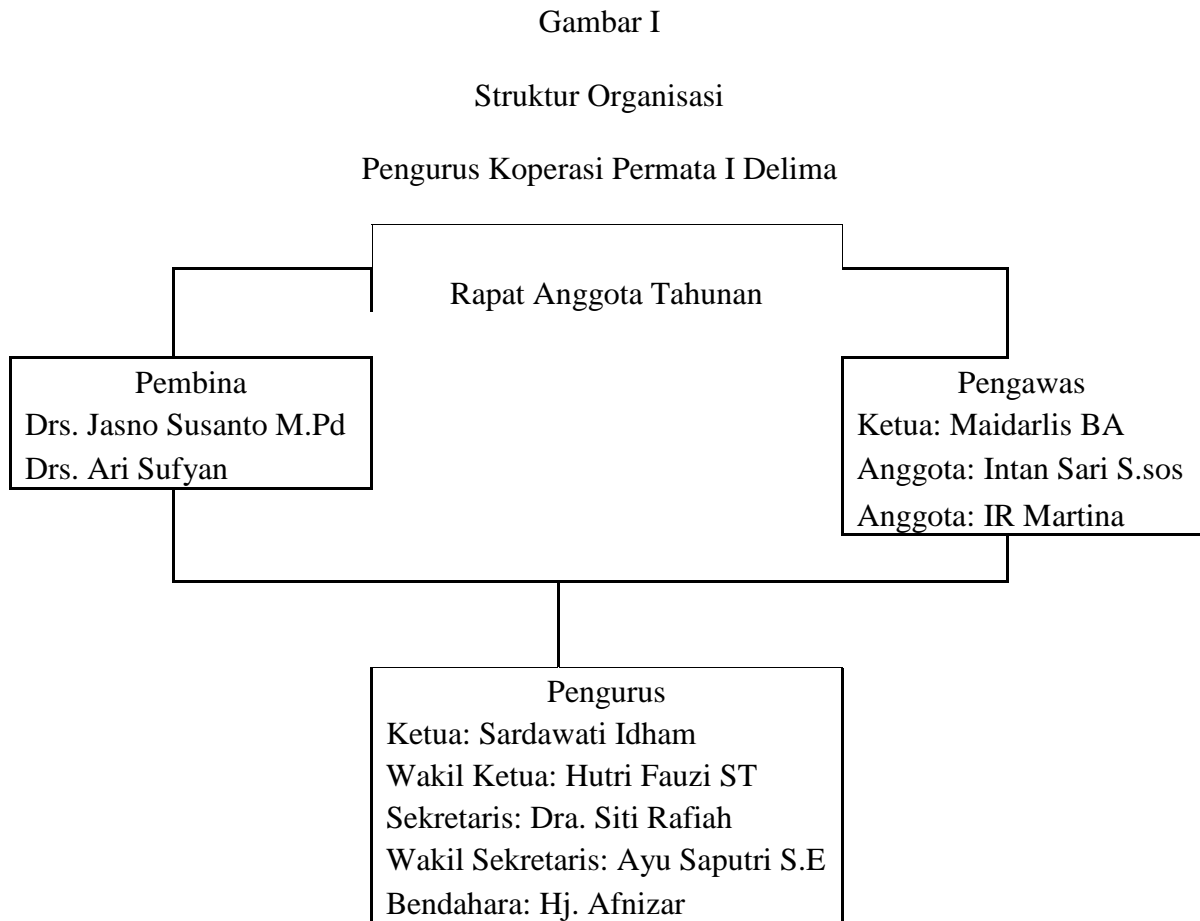
1. Membantu para pedagang kecil dan menengah didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
2. Memberikan jasa layanan menabung dan pinjaman kepada masyarakat kecil dan menengah

² *ibid*

3. Sebagai penyeimbang system perekonomian Indonesia dalam bentuk organisasi masyarakat.

C. Struktur Organisasi Koperasi Permata I Delima

Struktur organisasi merupakan kerangkaan yang menunjukkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan tersebut, batas-batas wewenang serta tanggung jawab setiap bagian dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi akan memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang, alur fungsional maupun intruksional, sehingga dengan adanya susunan bagian yang terorganisasi dengan sebaik-baiknya akan melancarkan kerja perusahaan. Oleh karena itu struktur organisasi senantiasa di tegaskan dengan adanya *job discription*, stuktur organisasi pada Koperasi Permata I Delima ialah:



1. Rapat anggota tahunan.
 - a. Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan
 - b. Rapat anggota tahunan dilakukan satu tahun sekali
 - c. Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
 - d. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahu sebelumnya
 - e. Pengesahan rancangan program kerja

2. Badan pengawas

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan koperasi
- b. Sebagai penasehat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola
- c. Membuat laporan tertulis tentang hasil laporannya.

3. Ketua

- a. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pelaksanaan tugas, pengurus dan karyawan
- b. Memimpin rapat anggota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota
- c. Memberikan keputusan akhir dalam kepengurusan koperasi dengan memperhatikan usul atau saran dari pemegang fungsi dibawahnya seperti sekretaris, bendahara dan lain-lain

4. Sekretaris

- a. Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku kepengurusan dan organisasi
- b. Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dalam hal yang saling berkaitan
- c. Menyelenggarakan surat masuk maupun surat keluar dibidang organisasi

5. Bendahara

- a. Membuat permodalan baik luar maupun dari dalam serta mengatur dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran
 - b. Membuat buku besar seperti buku kas, buku bank, buku piutang, buku besar pembantu dan buku besar lainnya
6. Anggota atau nasabah
- a. Anggota berkewajiban membayar hutang atau pinjaman tepat pada waktunya
 - b. Anggota berkewajiban menjaga nama baik koperasi
 - c. Apabila anggota telat dalam pembayaran baik sengaja ataupun tidak sengaja akan dikenakan sanksi berupa teguran, skorsing atau denda

D. Program Kerja.

- 1. Bidang administrasi.
 - a. Menyempurnakan keadministrasian umumnya dan keuangan khususnya.
 - b. Melaksanakan ketertiban organisasi di antaranya: ketertiban administrasi, organisasi dan usaha.
 - c. Melengkapi keperluan alat-alat administrasi dan perkantoran.
 - d. Meningkatkan kedisiplinan.
 - 1). Setiap peminjaman harus diketahui atau disaksikan oleh pengurus koperasi
 - 2). Mendisiplinkan penerimaan dan pembayaran anggota

3). Melaksanakan segala perubahan yang sesuai dengan Anggaran Dasar

2. Bidang organisasi

- a. Bentuk kepengurusan tetap sesuai dengan RAT tahun buku sebelumnya yakni satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan satu orang juru tulis
- b. Karyawan tetap sesuai dengan kebutuhan yang ada
- c. Penerimaan anggota baru tetap sesuai dengan penelitian, agar tidak mengganggu anggota yang aktif atau disiplin
- d. Bagi anggota yang mengalami kredit macet dengan sengaja. Maka berusaha menyelesaikan melalui badan hukum (kebijaksanaan atau pengadilan)

3. Bidang usaha

- a. Bidang usaha yang dilakukan tetap simpan pinjam
- b. Melaksanakan usaha lain yang menguntungkan Koperasi Permata I Delima
- c. Mengusahakan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga yang menguntungkan.

BAB III

TELAAH PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *cooperation* yang diartikan sebagai bekerjasama. Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹

Sedangkan menurut Ninik Widiyanti dalam buku “Koperasi Indonesia dan Perekonomian” Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk atau keluar anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, definisi ini mengandung arti bahwa:²

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan modal (bukan akumulasi modal) akan tetapi persekutuan sosial.
- b. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.

¹ Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), Cet ke-2, h.1

² Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), cet ke-4, h.1

- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.³

Bapak Margono Djojohadikoesoema dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi 1941” mengatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya. Dari pengertian koperasi dapat kita simpulkan:⁴

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam koperasi.
- b. Bahwa dengan bekerjasama manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkannya.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan ekonomis.

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud koperai adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang

³ Kasmir, *op cit.*, h. 270

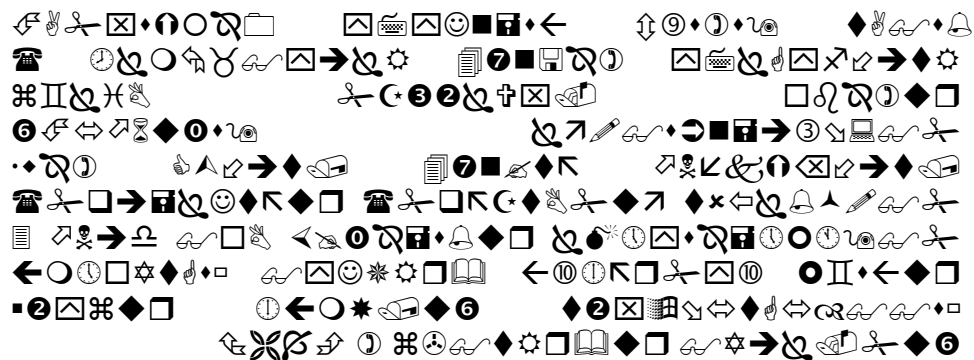
⁴ Hendrojogi, *Koperasi Azas, teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-6, h.22

bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.⁵

2. Dasar Hukum Koperasi (Syirkah)

Dasar hukum koperasi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam syariat Islam kebolehan koperasi atau *Syirkah* tercantum dalam Al-Qur'an Surat Syad ayat 24 yang berbunyi :



Artinya: “Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan”.⁶

⁵ Hendi Suhendi, *loc cit.*

3. Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau cirri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.⁷

Serangkaian prinsip yang sering dikemukakan, adalah tujuh prinsip koperasi yang dikemukakan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:⁸

- a. Keanggotaan terbuka (*open membership*)
- b. Satu anggota, satu suara (*one member, one vote*)
- c. Pengembalian (bunga) yang terbatas adalah modal (*limited return on capital*)

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*, h. 735

⁷ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *op cit.*, h. 20

⁸ Sri Djatnika, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2003), h. 17

- d. Alokasi Sisa Hasil Usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (*allocation of surplus in proportion to member transaction*)
- e. Penjualan tunai (*cash trading*)
- f. Netral dalam hal agama dan politik (*religious and political neutrality*)

Para pakar baik praktisi maupun ahli (akademisi) ilmu koperasi, telah memakai prinsip-prinsip Rochdale maupun prinsip-prinsip lainnya untuk mendefinisikan koperasi yang asli, atau benar, atau sejati itu, dan bagaimana mengevaluasi kinerja koperasi tersebut. Mereka telah menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai suatu alat utama dari kebijakan yang menyangkut manajemen koperasi baik secara mikro maupun makro, bahkan sering membuat prekondisi bagi keberhasilan koperasinya tersebut. Di bawah ini adalah contoh definisi yang menggunakan dua buah prinsip Rochdale.⁹

“Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya, dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan di antara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui. Keanggotaan, karena itu dapat dilihat sebagai suatu keluasan dari pemegang saham perusahaan kecuali bahwa didalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, dan pemegang modal bukan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam persatuan (perikatan) ini”.

⁹ *Ibid*, h. 17-18

4. Syarat-Syarat Pendirian Koperasi.

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat:

- a. Dilakukan dengan akta notaries.
- b. Disahkan oleh pemerintah.
- c. Didaftarkan di Pengadilan Negeri
- d. Diumumkan dalam berita Negara.

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran itu, pengurus koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama koperasi itu. Pimpinan koperasi adalah wakil koperasi di dalam dan di luar pengadilan.¹⁰

Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab IV, pasal 6 sampai dengan 8, rincian syarat-syarat pembentukan koperasi adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Hendi Suhendi, *op cit*, h.290

¹¹ Arifin Sitio & halomoan Tamba, *op cit*, h. 45-46

- a. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk (koperasi primer atau koperasi sekunder).
- b. Pembentukan koperasi primer memerlukan anggota minimal 20 orang anggota. Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi, minimal 3 koperasi.
- c. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- d. Anggaran Dasar koperasi minimal harus memuat beberapa hal berikut ini:
 - 1). Daftar nama pendiri.
 - 2). Nama dan tempat kedudukan.
 - 3). Maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dilakukan.
 - 4). Ketentuan mengenai keanggotaan.
 - 5). Ketentuan mengenai rapat anggota.
 - 6). Ketentuan mengenai pengelolaan.
 - 7). Ketentuan mengenai permodalan.
 - 8). Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya.
 - 9). Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
 - 10). Ketentuan mengenai sanksi

5. Jenis-Jenis Koperasi.

Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Banyaknya macam kebutuhan hidup manusia dan usaha

untuk memperbaiki kehidupan itu telah melahirkan berbagai jenis dan golongan koperasi. Dari berbagai jenis koperasi dapat dibagi ke dalam 5 (lima) golongan yaitu:¹²

a. Koperasi Konsumsi.

Barang konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya beras, gula, garam, minyak kelapa dan lain sebagainya. Barang sandang seperti pakaian, sabun, dll. Oleh sebab itu koperasi mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau biaya yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut koperasi kredit.

c. Koperasi Produktif.

Koperasi produktif bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya: koperasi

¹² Ginda, *Koperasi, Potensi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.12-

peternakan sapi perah yang memproduksi susu, koperasi pembuatan sepatu yang memproduksi sepatu dll.

d. Koperasi Jasa.

Koperasi jasa adalah koperasi yang bergerak pada bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya: koperasi angkutan umum, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, dll.

e. Koperasi Serba Usaha (SHU).

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Koperasi Serba Usaha atau lazim juga dikenal sebagai Koperasi Unit Desa adalah merupakan Unit Koperasi dengan kegiatan ekonomi yang meluas, dan tidak terbatas pada satu bidang saja. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh koperasi serba usaha antara lain: perkreditan, penyediaan, dan penyaluran sarana produksi pertanian, pengolahan suatu pemasaran hasil-hasil pertanian dan sebagainya.

Dalam islam koperasi (syirkah ta'awuniah) terbagi ke dalam empat macam yaitu:¹³

- 1) *Syirkah 'Innan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk suatu usaha atas dasar pembagian

¹³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), Cet ke-3, h. 188.

pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

- 2) *Syirkah Mufawadhoh*, yaitu suatu persekutuan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan syarat mempunyai kesamaan dalam jumlah modal, keuntungan, serta agama yang dianut.
- 3) *Syirkah Abdan*, atau disebut juga *syirkah a'mal* yaitu persekutuan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama dan hasilnya dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- 4) *Syirkah Wujuh*, yaitu bersekutunya dua pemimpin untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan dibagi diantara mereka dengan syarat yang telah ditentukan.

6. Fungsi dan Peran Koperasi.

a. Fungsi koperasi adalah:

- 1). Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- 2). Alat pendemokrasian nasional.
- 3). Alat pembinaan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam tata perekonomian rakyat.
- 4). Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.

b. Peran koperasi.

Peran koperasi di Indonesia adalah:

- 1). Mempersatukan, mengarahkan dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang serba terbatas kemampuan ekonominya.
- 2). Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.
- 3). Koperasi berperan aktif dalam menciptakan dan membuka lapangan pekerjaan baru.
- 4). Koperasi berperan aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi Indonesia.¹⁴

B. Kredit.

1. Pengertian Kredit dan Masalahnya

Menurut Adiwarman A. Karim, beberapa istilah perbankan modern berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti kredit (Inggris: *kredit*, Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *Qard*. Kredit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* artinya kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqh *qard* berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*, Prancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa

¹⁴ Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Cet ke-3, h.76

arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar.¹⁵

Dalam tatanan konsep ekonomi Indonesia, kredit sudah ada dalam sebuah ketentuan hukum yang dicantumkan dalam undang-undang perbankan. Pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹⁶

Kredit dalam perbankan syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Dalam beberapa hal ini, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan/kredit seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.¹⁷

¹⁵ Adiwarman.A.Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) Cet 2, h. 19

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). Cet IV, h. 91.

Kredit bermasalah atau *non performing loan*, merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Oleh karena itu, mottonya adalah bahwa lebih dini *potential problem loan* ditentukan, maka akan lebih banyak alternative dan lebih banyak peluang pencegahan kerugian bank. Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah dan bagaimana alternative penyelesaiannya. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah adalah sbb:¹⁸

a. Karena kesalahan bank

- 1). Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
- 2). Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
- 3). Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan apa manfaat kredit yang diberikan
- 4). Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
- 5). Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat

¹⁸ Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 478

b. Karena kesalahan nasabah

- 1). Nasabah tidak kompeten
- 2). Nasabah tidak atau kurang berpengalaman
- 3). Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
- 4). Nasabah tidak jujur
- 5). Nasabah serakah

c. Faktor eksternal

Akibat perubahan pada external *enviromtment* diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, seperti perubahan-perubahan *political* dan *legal environment*, *deregulasi sector real*, *financial* dan *economi* menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada seorang debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Satu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. *Problem loan* akan timbul oleh *external environment*, sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti:

- 1). Kondisi perekonomian
- 2). Perubahan-perubahan peraturan
- 3). Bencana alam

Strategi yang dapat ditempuh oleh bank untuk mengatasi kredit bermasalah, yaitu:

- 1) Penyelamatan Kredit, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur;
- 2) Penyelesaian Kredit, yaitu suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui beberapa cara, sebagai berikut:

- 1). Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- 2). Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- 3). Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa: penambahan dana bank, dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi

penyertaan dalam perusahaan, yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.¹⁹

2. Unsur-Unsur Kredit

Dalam aplikasi kredit dikenal unsur-unsur yang turut mempengaruhinya. Masing-masing unsur ini menjadi patokan semua bank dalam menjalankan aplikasi kredit. Jika salah satu unsur ini diabaikan, maka dapat dipastikan salah satu dari dua pihak ini (bank atau nasabah peminjam) akan mengalami kerugian, unsur-unsur tersebut adalah:

a. Kepercayaan.

Yaitu keyakinan pemberi kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan peneliti menyelidiki tentang nasabah baik intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi dan masa lalu dan sekarang terhadap pemohon kredit.

b. Kesepakatan.

Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah perjanjian diaman masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Perjanjian kredit ini mengikat kedua belah pihak secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

¹⁹<http://duniakontraktor.wordpress.com/2011/01/27/perjanjian-kredit-dan-permasalahannya/>

c. Jangka waktu.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

d. Resiko.

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resiko bagi bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja oleh nasabah seperti bencana alam atau kebangkrutan usaha nasabah tanpa ada unsure kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa.

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah ditentukan oleh bagi hasil.²⁰

3. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan fasilitas kredit maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh

²⁰ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) Cet ke-6. h 95

dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan cara untuk dapat mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan akurat.

Dalam melakukan penilaian kredit dikenal dengan prinsip analisis 5C dan 7P yaitu:²¹

- a. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan kredit harus dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik pekerjaan maupun gaya hidup, keluarga hobi dan jiwa sosial.
- b. *Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.
- c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitas dan sebagainya.

²¹ *ibid*

- d. *Condition*, penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan resiko kredit bermasalah dapat diantisipasi.
- e. *Corrateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

- a. *Personality* yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kehidupan dimasa lalu. Penilaian ini mencakup sikap, emosi dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
- b. *Party* yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c. *Purpose* mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit dan arah penggunaan dana kredit tersebut.
- d. *Prospect*, menilai usaha nasabah dimasa akan datang menguntungkan atau tidak.
- e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

- f. *Profitability*, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah meningkat atau tidak.
- g. *Protection*, bagaimana menjaga agar kredit yang disalurkan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang digunakan benar-benar aman.

C. Kafalah (Penjamin).

1. Pengertian Al-Kafalah

Al-kafalah menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amanah* (tanggungan). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* sebagai mana yang dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:²²

- a. Menurut Mazhab Hanafi, *al-kafalah* adalah menggabungkan dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda.
- b. Menurut Mazhab Maliki, *al-kafalah* adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.
- c. Menurut Mazhab Hanbali, *al-kafalah* adalah iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang

²² Hendi Suhendi, *op cit*, h. 187-188

mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".²⁴

3. Rukun Al-Kafalah.

- a. *Adh-Dhamin* (orang yang menjamin)
- b. *Al-Madhmun lahu* (orang yang berpiutang)
- c. *Al-Madhmun 'anhu* (orang yang berhutang)
- d. *Al-Madhmun* (objek jaminan) berupa hutang, uang, barang atau orang
- e. *Sighah* (akad/ijab)

4. SYARAT Al-Kafalah

- a. *Adh-dhamin* yaitu orang yang menjamin dimana ia disyaratkan sudah *baligh*, berakal, merdeka dalam mengelola harta bendanya/tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- b. *Al-Madhmun lahu* yaitu orang yang berpiutang, bisa disebut juga *mafkul lahu*. Syaratnya yang berpiutang diketahui oleh orang yang menjamin karena manusia tidak sama dalam hal tuntutan, ada yang keras dan ada yang lunak.

Hal ini dilakukan untuk kemudahan dan kedisiplinan terutama dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*, h. 327

- c. *Al-Madhmun* 'anhu adalah orang yang berutang, tidak disyaratkan baginya kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunak, baik orang yang berhutang rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela/ridha.
- d. *Al-Madhmun* adalah utang, barang atau orang. Disebut juga *madmun bih* atau *makful bih*. Disyaratkan pada *madhmun* dapat diketahui dan tetap keadaannya (ditetapkan), baik sudah tetap maupun akan tetap. Oleh karena itu tidak sah *dhaman* (jaminan), jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan karena ada kemungkinan hal ini ada *gharar* (tipuan/ketidakjelasan)
- e. *Sighat* atau *lafadz* adalah pernyataan yang diucapkan oleh penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Umpamanya “Saya menjamin hutangmu kepada si A” dan sebagainya yang mengandung ungkapan jaminan. Lafadz-lafadz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama adalah seperti lafadz : *Tahammaltu, takaffultu, dhammintu, ana kafil laka, ana za'im, huwa laka 'indi*, atau *huwa laka 'alaya*.

Shighat hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *kafalah/dhaman* hanya pernyataan sepihak saja. Hendaknya diingat bahwa

jaminan berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah.²⁵

5. Macam-Macam Kafalah

Secara umum *kafalah* dibagi menjadi 2 bagian :

a. *Kafalah bil wajh* (kafalah dengan jiwa)

Yaitu adanya keharusan pada pihak penjamin (*al-kafil/al-dhamin/al-za'im*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (*makfu lahu*). Penjaminan yang menyangkut masalah manusia hukumnya *mubah* (boleh). Orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena *kafalah* menyangkut badan bukan harta.

Contohnya : A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara *mahkamah* (pengadilan) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Penjaminan tentang hak Allah seperti *had al-khamar* dan *had* menuduh zina tidak sah, sesuai hadits Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada kafalah dalam had”. (HR. Baihaqi)

Menurut madzhab Maliki, jika seseorang menjamin akan menghadirkan seseorang maka orang tersebut wajib menghadirkannya. Bila ia tidak dapat menghadirkannya, sedangkan penjamin masih hidup atau penjamin itu

²⁵ <http://warungghuroba.wordpress.com/2010/09/23/bab-11-kafalah-penjaminan/>

berhalangan hadir maka penjamin wajib membayar utang orang yang ditanggungnya.

- b. *Kafalah bil mal* (kafalah dengan harta) yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh *dhamin/kafil* dengan pembayaran (pemenuhan) harta.

Kafalah harta ada 3 macam :

- 1). *Kafalah bi al-dayn* adalah kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Contoh : A menjamin utang B kepada C.
- 2). Kafalah dengan penyerahan benda yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-*ghasab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan materi tersebut yang dijamin untuk *ashil* seperti dalam kasus *ghasab*. Namun bila bukan berbentuk jaminan, *kafalah* batal.

Contoh : A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B kepada C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C maka A wajib mengembalikannya kepada C.
- 3). Kafalah dengan 'aib adalah bahwa barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya (cacat) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya maka ia (pembawa barang) sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai.

6. Pelaksanaan Kafalah

Kafalah dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu :²⁶

- a. Munjaz (*tanjiz*) adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata, “Saya tanggung si Fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”. Apabila akad penanggungan terjadi maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan atau dicicil kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- b. Mu’allaq (*ta’liq*) adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata, “Jika kamu mengutangkan pada anakku maka aku yang akan membayarnya” atau “Jika kamu ditagih A maka aku yang akan membayarnya”.
- c. Mu’aqqat (*tauqit*) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “Bila ditagih pada bulan Ramadhan maka aku yang menanggung pembayaran utangmu”. Menurut madzhab Hanafi penanguhan seperti ini sah tetapi menurut madzhab Syafi’i batal. Apabila akad telah berlangsung maka *madmun lahu* boleh menagih kepada *kafil* atau kepada *madhmun ‘anhu*, hal ini dijelaskan oleh jumhur ulama.

²⁶ *ibid*

7. Pembayaran Dhamin

Apabila orang yang menjamin (*dhamin*) memenuhi kewajibannya dengan membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta kembali kepada *madhmun* 'anhu apabila pembayaran itu atas izinnya.

Dalam hal ini para ulama sepakat, namun mereka berbeda pendapat apabila penjamin membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut Syafi'i dan Hanafi bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah *sunnah* dan *dhamin* tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada *madhmun* 'anhu. Menurut madzhab Maliki, *dhamin* berhak menagih kembali kepada *madhmun* 'anhu.

Menurut Ibnu Hazm, *dhamin* tidak berhak menagih kembali kepada *madhmun* 'anhu atas apa yang telah ia bayarkan baik dengan izin *madhmun* 'anhu maupun tidak. *Kafil* berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali membayar atau *madhmun lahu* membebaskan utang untuk *kafil* adalah mem-*fasakh*-kan (menghapus) akad *kafalah*, sekalipun *madhmun* 'anhu dan *kafil* tidak rela.²⁷

²⁷ *Ibid.*

BAB IV

PENGELOLAAN KREDIT BAKUL PADA KOPERASI PERMATA I DELIMA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Prosedur Pemberian Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru

Kredit bakul adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil tanpa agunan untuk pembiayaan investasi atau modal kerja. Kredit bakul ini bertujuan untuk membantu dan memberikan akses pelayanan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit yang bersifat produktif baik modal kerja maupun investasi untuk mengembangkan usaha.¹

Pada koperasi ini yang dapat meminjam adalah anggota dan non anggota. Pada koperasi ini membagi 5 kelompok yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kelompok tersebut terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dengan karakteristik bahwa yang menjadi anggota kelompok tersebut adalah anggota koperasi dan yang meminjam boleh anggota dan non anggota. Pengelompokan ini dimaksudkan bertujuan untuk masing-masing anggota bertanggung jawab dengan masing-masing anggotanya.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit bakul, nasabah harus melengkapi syarat dan prosedur kredit yang ditetapkan oleh Koperasi Permata I Delima.

¹ Ayu Saputri (Wakil Sekretaris Koperasi Permata I Delima Pekanbaru), *wawancara*, di Pekanbaru, Senin, 2 Mei 2011

Prosedur pemberian kredit bakul ini dimulai dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian seksi simpan pinjam. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas dan calon nasabah pinjaman kredit pada saat pengajuan dan pelayanan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Pemohon (peminjam) meminta blanko kepada seksi simpan pinjam dan mengisi formulir permohonan pinjaman
2. Seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman jika masih ada kewajiban
3. Formulir tersebut akan diajukan pada ketua koperasi untuk persetujuan
4. Formulir yang telah disetujui ketua koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya.

Adapun persyaratan dalam pemberian kredit bakul adalah sbb:

1. Mengisi formulir pinjaman materai Rp 6000,- 1 lembar
2. Foto copy KTP suami/istri
3. Foto copy Kartu keluarga
4. Pas foto suami/istri ukuran 3x4 2 lembar
5. Foto copy surat nikah suami/istri
6. Foto copy NPWP²

² Sardawati, (Ketua Koperasi Permata I Delima), *wawancara*, di Pekanbaru, Rabu, 11 Mei 2011

Prosedur kredit bakul yang terdapat pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru tidak terlepas dari kebijakan pengurus organisasi Koperasi Permata I Delima Pekanbaru. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang prosedur/ tata cara peminjaman kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1

Pendapat Responden Tentang Prosedur/Tata Cara Peminjaman Kredit Bakul

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Sangat Mudah	5	11,90
B	Mudah	26	61,90
C	Cukup Mudah	8	19,04
D	Sukar	3	7,14
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 5 orang (11,90%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 26 orang (61,90%), yang menjawab opsi C sebanyak 8 orang (19,04%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 3 orang (7,14%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tentang prosedur/ tata cara peminjaman kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru mudah. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “B” yaitu mudah sebanyak 26 orang atau 61,90%

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pendapat responden tentang kelengkapan persyaratan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2

Pendapat Responden Tentang Kelengkapan Persyaratan Kredit Bakul

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Sangat Mudah	7	16,66
B	Mudah	23	54,76
C	Cukup Mudah	10	23,80
D	Sukar	2	4,76
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 7 orang (16,66%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 23 orang (54,76%), yang menjawab opsi C sebanyak 10 orang (23,80%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 2 orang (4,76%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tentang kelengkapan persyaratan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru mudah. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “B” yaitu mudah sebanyak 23 orang atau 54,76%

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3

Pendapat responden tentang pelayanan Koperasi Permata I Delima

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Sangat Memuaskan	11	26,19
B	Memuaskan	19	45,23
C	Tidak Memuaskan	8	19,04
D	Menjengkelkan	4	9,52
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 11 orang (26,19%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 19 orang (45,23%), yang menjawab opsi C sebanyak 8 orang (19,04%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 4 orang (9,52%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tentang pelayanan yang diberikan Koperasi Permata I Delima Pekanbaru memuaskan. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “B” yaitu memuaskan sebanyak 19 orang atau 45,23%

B. Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima

Menurut kamus bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, sedangkan secara umum pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang menjadi struktur dalam mengembangkan koperasi.

Proses pengelolaan dalam suatu koperasi atau lembaga memerlukan pengelola atau pengurus yang telah ditunjuk oleh anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi

dalam koperasi dan dilaksanakan pada waktu rapat anggota antara lain: badan pengawas, badan pemeriksa, manajer, bidang administrasi dan pengurus.³

Pengelolaan Kredit adalah pengelolaan piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang dengan pembayaran kredit. Transaksi penjualan kredit pada umumnya terjadi atas dasar kepercayaan (*credo*) sehingga piutang (*kredit*) yang timbul tidak dijamin dengan surat-surat formal yang bersifat mengikat seperti surat wesel atau promes. Oleh karena itu untuk pengamanannya harus dimulai dengan tindakan kehati-hatian dalam pemberian kredit serta sistem pengelolaan yang memadai.⁴

Pengelolaan perkreditan atau manajemen perkreditan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen perbankan secara keseluruhan, karena sebagian besar pendapatan bank masih mengandalkan sektor kredit. Namun, pelaksanaan kredit oleh bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Biasanya risiko pemberian kredit tersebut dinilai tinggi (*high risk*). Sikap hati-hati merupakan prinsip yang harus selalu diterapkan dalam setiap pemberian kredit. Tujuannya adalah mencegah resiko yang mungkin terjadi.⁵

Koperasi Permata I Delima Pekanbaru merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam (kredit). Koperasi ini berdiri pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 koperasi ini telah berbadan hukum dengan No.

³ Badadu M.Zain, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 188

⁴ <http://widyamauretya.blogspot.com/2010/12/pengelolaan-kredit.html>

⁵ Ade Arthesa & Edia handiman, *op cit*, h. 165

397/BH/DISKOP & UKM/3/IV/2004. Pengelolaan usaha koperasi dapat dilakukan oleh Direksi/Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus. Direksi/Manajer berkewajiban untuk menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan. Selain bergerak dibidang simpan pinjam (kredit), koperasi ini juga mengusahakan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga yang menguntungkan.

Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru, Koperasi ini membagi 5 kelompok yang berfungsi untuk mengawasi para pedagang yang meminjam kredit bakul tersebut, pada setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas pedagang atau anggota yang meminjam kredit bakul, apabila terdapat anggota atau pedagang yang mengalami penunggakan pembayaran atau terjadinya macet maka yang akan bertanggung jawab adalah ketua kelompok tersebut sehingga usaha koperasi tersebut dapat berkembang dan mengalami peningkatan .⁶

Kemudian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut:

⁶ Erni, (Pengelola Koperasi Permata I Delima), *wawancara*, di Pekanbaru, Kamis, 23 Juni 2011

Tabel 4

Pendapat Responden Tentang Pengelolaan Kredit Bakul

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Sangat Baik	8	19,04
B	Baik	27	64,28
C	Kurang Baik	5	11,90
D	Tidak Baik	2	4,76
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 8 orang (19,04%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 27 orang (64,28%), yang menjawab opsi C sebanyak 5 orang (11,90%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 2 orang (4,76%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tentang pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru baik. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “B” yaitu baik sebanyak 27 orang atau 64,28%

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pinjaman yang biasanya dipinjam oleh responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5

Besar Pinjaman Responden Kepada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	1-3 juta	24	57,14
B	4-6 juta	10	23,80
C	7-9 juta	5	11,90
D	Besar dari 10 juta	3	7,14
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 24 orang (57,14%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 10 orang (23,80%), yang menjawab opsi C sebanyak 5 orang (11,90%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 3 orang (7,14%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa mayoritas responden meminjam dana pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru berkisar 1-3 juta yaitu sebanyak 24 orang atau 57,14%

Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dalam memberikan pinjaman pada anggotanya atau pedagang yang meminjam kredit bakul tersebut mereka menerapkan potongan sebesar 5% dari pinjaman yang diberikan, untuk mengetahui Pendapat Responden Tentang Pemotongan Pinjaman yang Diberikan Oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Pendapat Responden Tentang Pemotongan Pinjaman yang Diberikan Oleh Koperasi
Permata I Delima Pekanbaru

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Sangat Memberatkan	3	7,14
B	Memberatkan	5	11,90
C	Agak Memberatkan	11	26,19
D	Tidak Memberatkan	23	54,76
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 3 orang (7,14%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 5 orang (11,90%), yang menjawab opsi C sebanyak 11 orang (26,19%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 23 orang (54,76%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tentang pemotongan pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru tidak memberatkan. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “D” yaitu tidak memberatkan sebanyak 23 orang atau 54,76%

Pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru berkisar dari Rp 1 juta – Rp 15 juta, Selanjutnya untuk mengetahui Pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru Dalam Mengembangkan Usaha oleh responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7

Pendapat responden tentang Pinjaman yang diberikan Koperasi Permata I Delima
Pekanbaru Dalam Mengembangkan Usaha

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Lebih Dari Cukup	7	16,66
B	Cukup/Pas-pasan	26	61,90
C	Kurang	6	14,28
D	Sangat Kurang	3	7,14
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 7 orang (16,66%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 26 orang (61,90%), yang menjawab opsi C sebanyak 6 orang (14,28%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 3 orang (7,14%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tentang pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru dalam mengembangkan usaha cukup/pas-pasan. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “B” yaitu cukup/pas-pasan sebanyak 26 orang atau 61,90%.

Jika dilihat, hal ini mengakibatkan pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima kurang dalam mengembangkan usaha, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan target malah akan mengalami kerugian. Akibatnya anggota tidak dapat membayar kredit dan akan menghambat perkembangan Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu responden yang bernama Erna yang menyatakan bahwa para pengelola Koperasi Permata I Delima Pekanbaru tidak pernah memberikan pembinaan kepadanya, sehingga dalam usaha Erna mengalami kerugian karena kurang paham dalam pemutaran modal yang ia peroleh.⁷

Dari hasil wawancara dari petugas koperasi yaitu ibuk Mawi bahwa banyak anggota yang menunggak dalam membayar pinjaman kredit bakul, hal ini dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 8

Pendapat Responden Tentang Penunggakan Dalam Pembayaran Pinjaman Kredit
Bakul

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Pernah	15	35,71
B	Sering	2	4,76
C	Tidak Pernah	21	50,00
D	Kadang-Kadang	4	9,52
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 15 orang (35,71%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 2 orang (4,76%), yang menjawab opsi C sebanyak 21 orang (50,00%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 4 orang (9,52%).

⁷ Erna, Anggota Koperasi Permata I Delima Pekanbaru, *Wawancara*, di Pekanbaru, Senin, 6 Juni 2011

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tidak pernah mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman kredit bakul. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “C” yaitu tidak pernah sebanyak 21 orang atau 50,00% .

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi bagi anggota atau pedagang yang terlambat membayar atau mengalami penunggakan pinjaman kredit bakul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9

Sanksi yang Diberikan Apabila Responden Mengalami Penunggakan Pembayaran
Pinjaman Kredit Bakul

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Harus Membayar Denda/ Discor	5	11,90
B	Harus Membayar Denda	10	23,80
C	Mendapat Teguran Dari Pengurus	23	54,76
D	Tidak Ada Sanksi	4	9,52
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 5 orang (11,90%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 10 orang (23,80%), yang menjawab opsi C sebanyak 23 orang (54,76%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 4 orang (9,52%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa sanksi yang diberikan oleh responden apabila mengalami penunggakan pembayaran pinjaman kredit bakul adalah sebagai berikut: Mendapat Teguran Dari Pengurus, Harus Membayar Denda,

Harus Membayar Denda/ Discor, Tidak Ada Sanksi. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “C” yaitu tidak pernah sebanyak 23 orang atau 54,76%

Selanjutnya untuk mengetahui pendapat responden terhadap kebijakan pengurus koperasi Permata I Delima Pekanbaru bagi peminjam yang mengalami penunggakan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 10

Pendapat Responden Tentang Sanksi yang Diberikan Oleh Pihak Koperasi Permata I
Delima Pekanbaru

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Sangat Memberatkan	4	9,52
B	Memberatkan	6	14,28
C	Agak Memberatkan	11	26,19
D	Tidak Memberatkan	21	50,00
	Jumlah	42	100

Keterangan: dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden menjawab opsi A sebanyak 4 orang (9,52%), sedangkan yang menjawab opsi B sebanyak 6 orang (14,28%), yang menjawab opsi C sebanyak 11 orang (26,19%) dan yang menjawab opsi D sebanyak 21 orang (50,00%).

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa pendapat responden tentang sanksi yang diberikan oleh Pihak Koperasi Permata I delima Pekanbaru tidak memberatkan. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “C” yaitu tidak memberatkan sebanyak 21 orang atau 50,00%

Selanjutnya untuk mengetahui penyebab responden mengalami penunggakan dalam pembayaran kredit bakul dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11

Penyebab Responden Mengalami Penunggakan Pembayaran Pinjaman kredit Bakul

Dari Koperasi Permata I Delima Pekanbaru

NO	Alternatif jawaban	Jumlah	%
A	Kurangnya Pendapatan Usaha	15	35,71
B	Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Sehari-hari	24	57,14
C	Usaha bangkrut	3	7,14
	Jumlah	42	100

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab responden mengalami penunggakan dalam pembayaran kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima yang menyatakan bahwa penunggakan karena kurangnya pendapatan usaha yang mereka kelola disebabkan banyak persaingan dalam usaha sebanyak 15 orang atau 35,71%, responden yang menyatakan karena peminjaman dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak 24 orang atau 57,14%, hal disebabkan karena banyak persaingan jual beli menyebabkan mereka sedikit dari uang tersebut ditarik untuk kebutuhan keluarga, sedangkan responden yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penunggakan oleh usaha yang dikelolanya bangkrut disebabkan seringnya ditarik untuk kehidupan sehari-hari sebanyak 3 orang atau 7,14%.

Dari data diatas dapat kita peroleh kesimpulan bahwa penyebab responden mengalami penunggakan pembayaran pinjaman kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru adalah sebagai berikut: Kurangnya Pendapatan Usaha,

Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Sehari-hari, Usaha bangkrut. Hal ini terbukti banyaknya jawaban responden memilih opsi “C” yaitu dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sebanyak 17 orang atau 40,47%

C. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Kredit Bakul Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru

Islam sebagai agama memuat ajaran yang bersifat komprehensif dan universal.

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadat diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai kholifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main (*rules of the game*) aturan main manusia dalam kehidupan manusia.

Universal bermakna syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir kelak. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali RA.⁸

⁸ Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV Wicaksana, 2002), h. 19

Pengelolaan Kredit Bakul di Koperasi Permata I Delima Pekanbaru menggunakan system pemotongan modal. Potongan modal ini dipergunakan untuk jasa, administrasi dan kesejahteraan anggota.

Dalam segenap aspek kehidupan muamalah terutama bisnis dan transaksi, Islam memiliki system perekonomian yang berbasis al-qur'an dan al-hadits, ijma para ulama dan qiyas (sebuah penentuan hukum terhadap sebuah persoalan berdasarkan hukum sebelumnya). Sistem ekonomi tersebut belakangan dikenal dengan nama system ekonomi syari'ah.

Sistem ekonomi yang dianut oleh mayoritas, negara didunia yaitu sistem perekonomian kapitalis yang berbasiskan bunga (*interest/ usury*) ternyata tidak mampu menyelamatkan ekonomi dunia dari kehancuran dan keserakahan sekelompok orang kaya. Dalam operasi Koperasi Permata I Delima pekanbaru, saat ini masih menggunakan sistem bunga. Menurut Dr. Quraish Shihb dalam artikelnya yang berjudul “ membumikan al- qura'an, riba menurut al-qura'an” kata riba dari segi bahasa berarti” kelebihan”. Dalam al-quraan ditemukan kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surat yaitu al baqarah, al imran, an nisa dan al-rum. Tiga surat pertama adalah “ madaniyah”(turun setelah nabi hijrah kemadinah), sedangkan surat al-rum adalah “ makiyyah”(turun sebelum beliau hijrah). Ini berarti ayat yang pertama berbicara tentang riba adalah ar-rum ayat 39:



Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁹

Jadi, riba tidak akan memberikan manfaat untuk kemaslahatan manusia, karna allah tidak meridhainya. Sekelompok orang akan diuntungkan sekelompok lainnya teraniaya oleh bunga. Tentang hal ini allah berfirman dalam al- quraan yaitu surat al-baqarah ayat 278-281:

Artinya : “wahai orang- orang yang beriman bertakwalah kepada allah dan tinggalkanlah sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tdak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari allah dan rosulnya. Tapi jika kamu bertaubat , maka kamu berhak atas pokok hartamu . kamu tidak berbuat zalim(merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁰

Dalam ayat diatas jelas allah mengharamkan riba dan memasukkan mereka dalam neraka. Diceritakan, “Zaid bin Aslam & yang lainnya menuturkan bahwa redaksi ayat itu diturunkan berkaitan dengan Bani Amr Bin Umar dari Tsaqif dan

⁹ Al-Hikmah, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro,2005), h. 408

¹⁰ *Ibid*, h. 47

berkaitan dengan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Telah terjadi riba di antara mereka pada masa jahiliah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, Tsaqif meminta hartanya dari Bani Mughirah kemudian mereka bermusyawarah. Bani Mughirah berkata, “kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan akan menggantinya dengan usaha yang Islami”. Kemudian Utub Ibnu Asid pemimpin mekah, melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Dalam sepucuk surat. Maka diturunkanlah ayat diatas. Lalu, Rasulullah SAW membalas Utub dengan surat yang berbunyi “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, apabila kamu adalah orang-orang yang beriman. Apabila kamu tidak melaksanakan maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu”. Maka mereka berkata “ kamu bertobat kepada Allah dan kami akan meninggalkan sisa riba, maka mereka semua meninggalkannya”.¹¹

Allah SWT berfirman dalam al-qur'an yaitu surat al-Nisa' ayat 161-162:

لَمَّا سَأَلْنَا آلَ مُوْصَىٰ أَن قَرَّبُوا شَيْئًا إِذْ تَسْتَغِيثُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ فِي ظُلُمَاتٍ لَّئِيْلٍ مُّسْتَعْذِرٍ مُّذِنٍ فَمُتَّبِعٍ لَّمَّا قَالُوا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثَلُّوا فَبَدَّلَ اللَّهُ ذَاتَهُ بِيَسَّىٰ ابْنِ مَرْيَمَ إِذْ يَقُولُ مُخْلِصًا لَهُ النَّفْسَ إِذْ يُخَالِفُ بِمَا جَاءَهُ مِنَ الْأُمُورِ لِيُجِيبَ الْأَمْرَ فِي الْبُحُرِ لَمَّا سَأَلْنَا أَنبِيَائَهُم مَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِيُثَبِّتَ لَكُمُ الْكَلِمَ الْوَعْدَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ وَإِذْ تُلَاقُوا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَحَدِّثْهُ فِيمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِيُثَبِّتَ لَكُمُ الْكَلِمَ الْوَعْدَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ

Artinya: Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya

¹¹ M Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid 1, h. 458-459

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Dalam ayat diatas meskipun tidak secara tegas melarang orang islam menjalankan riba, tetapi memberi tahu bahwa riba yang dipraktekkan orang Yahudi-padahal sudah dilarang- telah menyebabkan mereka dilarang memanfaatkan barang-barang yang serba bagus, tayyibat, yang tadinya halal bagi mereka. Melihat kerasnya sangsi hukuman yang dijatuhkan kepada orang Yahudi ini, berarti riba yang mereka praktekkan bukan kesalahan kecil, tetapi kesalahan besar yang meresahkan orang banyak.¹²

Sejak tahun 1960-an, larangan bunga bank telah menjadi pembicaraan menarik dikalangan umat Islam. Pembicaraan ini membawa konsekuensi logis terhadap anggapan bahwa bunga bank yang umumnya berlaku dalam system dunia perbankan dewasa ini termasuk riba. Setidaknya terdapat dua pendapat mendasar yang membahas tentang riba. Pendapat pertama berasal dari kalangan mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum Islam). Interpretasi ini berimplikasi terhadap setiap tambahan dari penjamin yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan oleh peminjam (debitur) kepada pihak yang meminjami (kreditur) termasuk riba. Pendapat lainnya mengatakan, bahwa larangan terhadap riba dipahami

¹² Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Titipan Antisipatif)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet ke-2, h. 79

sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat.¹³

Menurut Hasan salah seorang guru besar Islam mengemukakan pendapat bahwa sifat riba adalah:

1. Memaksa, yaitu apabila telah jatuh tempo orang yang berhutang dipaksa memilih antara membayar atau menambah utangnya. Andai kata ia tidak dapat membayar terpaksa ia terima tambahan utangnya.
2. Dharar, yaitu menimbulkan kesusahan lantaran berat dan mahal nya, sekiranya berdagang dengan uang tidak dapat untung yang cukup buat makan, minum dan membayar hutang.
3. Berlipat ganda, yaitu tidak terbatas walaupun kecil bunga yang dipungut dari suatu pinjaman akan memberatkan juga lantaran berlipat ganda.¹⁴

Pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru, pengelola menerapkan sistem bunga dan potongan modal sehingga banyak masyarakat yang tidak setuju atas pengelolaan tersebut tetapi karena mereka atau masyarakat membutuhkan dana untuk menambah modal dalam menjalankan usahanya maka mereka tetap meminjam di Koperasi Permata I Delima.

¹³ Abdullah Saeed, *op cit*, h. 27

¹⁴ Hamzah ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Dipanigoro, 1992), h.

Maulana Maududi dalam bukunya, *Riba*, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Bunga, disebut Maududi, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan.

1. Hal ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, asset apa pun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong untuk bersikap tamak, menjadi seorang pecemburu terhadap milik orang lain, serta cenderung menjadi seorang yang kikir.
2. Secara psikologi, praktik pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sector usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur dirumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya, sekalipun ia tidur, uangnya bekerja dengan kecepatan 60% hingga 70% pertahun

3. Hidup dalam system ribawi.¹⁵

Praktek riba pada masa pra-Islam berkecendrungan menyebabkan pihak yang berhutang (debitur) menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya, yang menyeret pihak yang berhutang (debitur) terjerat oleh beban hutangnya. Oleh karenanya, sangatlah tidak mungkin untuk dapat melunasinya, yang konsekuensinya menimbulkan perbudakan.

Al-Qur'an sejak semula telah memusatkan perhatiannya terhadap permasalahan social ekonomi dalam kehidupan suatu masyarakat, terutama menyangkut persoalan mendasar manusia dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya, mengenai lapangan usaha dan semisalnya. Bagi sebagian besar orang, kebiasaan untuk melakukan aktifitas kerja keras secara kontinyu telah menjadi aturan hidup yang harus dikerjakan. Di sini tidak ada system legal yang dapat melindungi pihak yang punya tanggungan hutang (debitur) dari eksploitasi dan cengkremen pihak yang memberi piutang (kreditur). Dalam hal ini peminjam atau pihak yang berhutang dapat dirugikan dalam dua hal, yaitu kemiskinan dan dampak melemahnya kemampuan untuk dapat melunasi hutangnya.

Al-Qur'an secara jelas lebih menghubungkan larangan riba dengan konsep menafkahkan harta benda dengan suka rela, yang secara ekonomis dapat member perlindungan dan bantuan terhadap pihak yang tertekan oleh kesulitan hidup, dari

¹⁵ Syafi'I Antonio, *op cit*, h. 77

para eksploitasi. Hal ini dapat dijelaskan al-qur'an dalam konteks perintah kepada umat Islam untuk tidak menambah beban tanggungan hutang kepada debitur ketika tidak bisa mengembalikan hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan disarankan untuk hanya menerima sebesar nilai pokok dari jumlah yang dipinjamkannya. Di samping itu al-qur'an juga menyarankan untuk membebaskan beban hutangnya terhadap pihak debitur yang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutangnya, karena memaksa pelunasan hutang terhadap kondisi debitur yang demikian itu akan menjeratkan ke dalam jurang kemiskinan. Pemaksaan yang demikian itu merupakan perbuatan un-etika, immoral dan melanggar hak-hak asasi manusia.¹⁶

Apabila dikembalikan kepada pandangan tentang adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan hadis. Kesamaan itu sulit dibantah, apabila secara nyata aplikasi system bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya dari pada manfaatnya. Kemudharatan system bunga sehingga dikategorikan sebagai riba, antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri.
2. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.
3. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu.

¹⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet ke-3, h. 50-52

¹⁷ Muhamad, *op cit*, h. 158-159

4. Penanggung terakhir adalah masyarakat
5. Memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi
6. Terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa angket, wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa dari pengelolaan Koperasi Permata I Delima tidak dibolehkan dalam Islam, dengan alasan pengelolaan Koperasi Permata I Delima Pekanbaru sudah mengandung unsur riba.

Pinjam meminjam dalam Islam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya bila seseorang meminjam sesuatu, dalam hal ini tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang mengatakan, bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan ulama sepakat bahwa riba adalah haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*)¹⁸

¹⁸Ibid, h. 170

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pinjaman kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru para anggota atau non anggota harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada pada koperasi tersebut yaitu mengisi formulir pinjaman, foto copi KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga, pas foto suami/istri ukuran 3x4 2 lembar, foto copy surat nikah suami/istri dan foto copy NPWP. Setelah persyaratan lengkap anggota atau non anggota yang meminjam kredit bakul mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian seksi simpan pinjam dan mengisi formulir tersebut, kemudian seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman jika masih ada, dan formulir tersebut akan diajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan, apabila telah disetujui oleh ketua koperasi akan diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya. Proses ini dirasakan oleh anggota atau pedagang yang meminjam kredit bakul cukup mudah dan dana yang diberikan dapat

membantu anggota atau pedagang dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih meningkat.

2. Dalam pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru pengurus membentuk 5 kelompok yang bertujuan untuk mengawasi para pedagang atau anggota yang meminjam kredit bakul tersebut, tetapi dana yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, hal ini terjadi karena kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pengurus sehingga para pedagang mengalami penunggakan dalam pembayaran kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.
3. Sistem pengembalian kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru menggunakan sistem pemotongan modal sebesar 5%, tetapi menurut ekonomi Islam sistem pemotongan modal tersebut tidak dibolehkan karena dalam kaedah ekonomi Islam dinyatakan dengan jelas bahwa “setiap pinjaman yang memungut tambahan adalah riba”. Pinjam meminjam dalam Islam tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi SAW yang mengatakan, bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan ulama sepakat bahwa riba adalah haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan sebelumnya, maka penulis menyarankan agar:

1. Diharapkan kepada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru untuk melakukan pembinaan kepada anggota agar dana yang dipinjamkan oleh Koperasi betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan kepada koperasi Permata I Delima Pekanbaru agar bisa meninggalkan system bunga karena sangat memberatkan anggota yang meminjam uang, di samping itu juga bertentangan dengan ekonomi Islam.
3. Disamping itu juga, penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya sampai disini, melainkan penulis berharap untuk penelitian selanjutnya untuk meneliti tentang konsep ekonomi kerakyatan pada koperasi dan resiko yang terdapat pada pemberian kredit di koperasi, karena teori ini belum secara langsung ada, sehingga masih perlu diadakan penelitian lebih lanjut, dan akhirnya hasil penelitian akan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hikmah, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, Diterjemahkan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro,2005)
- Anoraga, Pandji, *Koperasi kewirausahaan dan usaha kecil*, (Jakarta:PT. Rineke Cipta, 2002), Cet ke-1
- Arthesa,Ade,Ir dan Handiman,Edia,Ir, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT Indeks,2006)
- Ar-Rifa'i, M Nasib, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), Jilid 1, h. 458-459
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Lagesindo, 2007), Cet ke-2.
- Djatika, Sri, *Ekonomi Teori & Manajemen*, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2003)
- Ginda, Koperasi, *Potensi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008)
- G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: bina Adi Aksara,2003), Cet ke-5
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2002)
- Hendrojogi, *Koperasi Azas, Teori & Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-6
- Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), Cet ke-3
- Kasmir,SE. MM. *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-5
- *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004), Cet ke-6

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Pres,2000). Cet Ke-1

M.Zain, Badadu, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Rifai, Moh, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV Wicaksana,2002)

Reksohadierodjo, Sukanto, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), Cet ke-2

Ruddin,Fuad Mohd Fach, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*, (Bandung: PT Alma'arif,1985), Cet ke-IV

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet ke-3

Sitio,Arifin,Drs dan Tamba,Halomoan,Ir, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga,2001)

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008)

Sulaiman ,Abi Daud, *Kitab Hadist Sunan Abu Daud*, (Bandung: PT Al-Ma'arif,1998), Cet Ke-11

Syafei, Rachmat, H.Prof Dr, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2006), Cet Ke-3

Widianti, Ninik, *Koperasi & Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2003), Cet ke-4

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Dipanigoro, 1992)

Zuhdi,Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung,1993), Cet Ke-V

Zuhri, Muh, Dr, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Titipan Antisipatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet ke-2

<http://widyamauretya.blogspot.com/2010/12/pengelolaan-kredit.html>

<http://warungghuroba.wordpress.com/2010/09/23/bab-11-kafalah-penjaminan/>

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pendapat Responden Tentang Prosedur/Tata Cara Peminjaman Kredit Bakul	54
Tabel 2	Pendapat Responden Tentang Kelengkapan Persyaratan Kredit Bakul	55
Tabel 3	Pendapat Responden Tentang Pelayanan yang Diberikan Pada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	56
Tabel 4	Pendapat Responden Tentang Pengelolaan Kredit Bakul	59
Tabel 5	Besar Pinjaman Responden Kepada Koperasi Permata I Delima Pekanbaru.....	60
Tabel 6	Pendapat Responden Tentang Pemotongan Pinjaman Yang Diberikan Oleh Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	61
Tabel 7	Pendapat Responden Tentang Pinjaman Yang Diberikan Koperasi Permata I Delima Pekanbaru Dalam Meningkatkan Usaha.....	62
Tabel 8	Pendapat Responden Tentang Penunggakan Dalam Pembayaran Pinjaman Kredit Bakul.....	63
Tabel 9	Sanksi Yang Diberikan Apabila Responden Mengalami Penunggakan Pembayaran Pinjaman Kredit Bakul	64
Tabel 10	Pendapat Responden Tentang Sanksi Yang Diberikan Oleh Pihak Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	65
Tabel 11	Penyebab Responden Mengalami Penunggakan Pembayaran Pinjaman Kredit Bakul Dari Koperasi Permata I Delima Pekanbaru	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Struktur Organisasi Pengurus Koperasi Permata I Delima Pekanbaru..21

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
2. Apa saja syarat-syarat mendapatkan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pedagang melakukan pinjaman kepada Koperasi Permata I Delima?
4. Bagaimana pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
5. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh para pengurus koperasi jika para anggota melakukan pinjaman kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima mengalami keterlambatan membayar atau tidak dapat membayar kepada koperasi pada saat jatuh tempo yang telah disepakati?
6. Apakah ada sanksi atau denda yang diberikan apabila anggota yang melakukan pinjaman kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima mengalami keterlambatan membayar atau tidak dapat membayar kepada koperasi pada saat jatuh tempo yang telah disepakati?
7. Keuntungan apa saja yang diberikan oleh Koperasi Permata I Delima kepada para anggota koperasi tersebut?
8. Apakah dana yang dipinjamkan oleh Koperasi Permata I Delima dapat membantu para pedagang dalam meningkatkan usahanya?

ANGKET

A) PETUNJUK PENGISIAN

- A. Penelitian ini dilakukan hanya untuk kepentingan ilmiah, penulis mengharapkan dukungan dan bantuan pihak responden untuk mengisi angket ini.
- B. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada (A),(B),(C) dan (D) yang tersedia pada setiap item pertanyaan.
- C. Atas kesediaan responden mengisi dan mengembalikan angket ini, penulis ucapkan terima kasih.

B) DATA RESPONDEN

- A. Nama : _____
- B. Umur : _____
- C. Pendidikan Terakhir : _____
- D. Alamat : _____

C) DAFTAR PERTANYAAN

- 1. Bagaimana menurut anda tentang prosedur/tata cara peminjaman kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Sukar
- 2. Bagaimana menurut anda tentang kelengkapan persyaratan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Sukar

3. Bagaimana pelayanan yang Bapak/Ibu/Saudara terima selama menjadi anggota Koperasi Permata I Delima?
 - a. Sangat memuaskan
 - b. Memuaskan
 - c. Tidak memuaskan
 - d. Menjengkelkan
4. Menurut Bapak/Ibu/Saudara bagaimana pengelolaan kredit bakul pada Koperasi Permata I Delima?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Kurang baik
 - d. Tidak baik
5. Berapa besar pinjaman yang Bapak/Ibu/Saudara dapatkan dari pihak koperasi?
 - a. 1-3 juta
 - b. 4-6 juta
 - c. 7-9 juta
 - d. Besar dari 10 juta
6. Apakah jumlah pemotongan yang dilakukan pihak koperasi dari jumlah kredit peminjaman memberatkan bagi Bapak/Ibu/Saudara?
 - a. Sangat memberatkan
 - b. Memberatkan
 - c. Agak memberatkan
 - d. Tidak memberatkan
7. Apakah pinjaman yang diberikan pihak koperasi kepada Bapak/Ibu/Saudara cukup untuk mengembangkan usaha?
 - a. Lebih dari cukup
 - b. Cukup/pas-pasan
 - c. Kurang
 - d. Sangat kurang

8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman di Koperasi Permata I Delima?
 - a. Pernah
 - b. Sering
 - c. Tidak pernah
 - d. Kadang-kadang
9. Sanksi apa yang Bapak/Ibu/Saudara terima dari pihak koperasi jika terjadi penunggakan?
 - a. Harus membayar denda/discor
 - b. Harus membayar denda
 - c. Mendapat teguran dari pengurus
 - d. Tidak ada sanksi
10. Apakah sanksi tunggakan yang Bapak/Ibu/Saudara terima memberatkan?
 - a. Sangat memberatkan
 - b. Berat
 - c. Agak berat
 - d. Tidak berat
11. Apakah yang menjadi penyebab sehingga Bapak/Ibu/Saudara mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman dari Koperasi Permata I Delima?
 - a. Kurangnya pendapatan usaha
 - b. Dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari
 - c. Usaha bangkrut